

PENGEMBANGAN BUSINESS ENTITY SEBAGAI BENTUK KONTRIBUSI MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KAWASAN MINAPOLITAN

¹Supriyati, ²Meliza, ³Aniek, ⁴Nuhman

^{1,2,3,4}STIE Perbanas Surabaya
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya
Telp. 08884842386
Email: supriyati@perbanas.ac.id

ABSTRACT

Candi Subdistrict is one of the districts in Sidoarjo district which is mostly covered is pertambakkan and has been launched into the Minapolitan. After the Lapindo mud disaster struck Sidoarjo regency, mothers fish farmers are encouraged to have a product processing business milkfish pond named group badjuri that are sustainable so as to improve their economy. However, they still have limitations in the management of business management and accounting so they have not been able to demonstrate the performance of business in transparam and accountable. The method of implementation of community service that is implemented is to provide training and business assistance. Business assistance directed at business management to the financial statements. This activity is also supported by BAPEDA and related agencies in the district of Sidoarjo also a major contribution in encouraging entrepreneurship in the district this temple. Now there are ten business processing continuous pond and be able to present the financial statements used for alternative media to raise the banking financial institution. Moral and material support from the government and related parties are expected to support the business development of these mothers that will contribute to the realization of Minapolitan in Sidoarjo.

Keywords: *Region Minapolitan, Entrepreneurship, Business Management, Accounting*

ABSTRAK

Kecamatan candi merupakan salah satu kecamatan di kabupaten sidoarjo yang sebagian besar wilayahnya adalah pertambakkan dan telah dicanangkan menjadi kawasan minapolitan. Setelah bencana lumpur lapindo melanda Kabupaten Sidoarjo, ibu-ibu petani tambak didorong untuk memiliki usaha pengolahan hasil tambak yang bernama kelompok bandeng badjuri yang bersifat berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan perekonomian mereka. Namun, mereka masih memiliki keterbatasan dalam pengelolaan manajemen usaha dan akuntansi sehingga mereka belum mampu menunjukkan kinerja usaha secara transparam dan akuntabel. Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat yang diimplementasikan adalah memberikan pelatihan dan pendampingan usaha. Pendampingan usaha diarahkan pada pengelolaan usaha sampai penyusunan laporan keuangan. Kegiatan ini juga didukung oleh BAPEDA dan dinas terkait di kabupaten sidoarjo juga turut memberikan kontribusi besar dalam mendorong wirausaha di kecamatan candi ini. Saat ini sudah ada sepuluh usaha pengolahan hasil tambak yang berkesinambungan serta mampu menyajikan laporan keuangan yang digunakan untuk media alternatif perolehan dana pada lembaga keuangan perbankan. Dukungan moril dan material dari pemerintah dan pihak terkait diharapkan mampu mendukung pengembangan usaha ibu-ibu ini yang akan memberikan kontribusi pada terwujudnya kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo.

Kata Kunci: *Kawasan Minapolitan, Kewirausahaan, Pengelolaan Usaha, Akuntansi*

I. PENDAHULUAN

Kabupaten Sidoarjo terletak pada daerah Delta Brantas di propinsi Jawa Timur. Kabupaten meliputi daerah pertambakkan yang luasnya mencapai 15.530 hektar (5,28 Km²) dan dimiliki sekitar 3.300 petambak. Kabupaten Sidoarjo banyak memiliki lahan pertambakkan diantaranya yang berada di kecamatan Sidoarjo, Jabon, Buduran, Candi, Tanggulangin, dan Sedati. Hasil tambak yang potensial adalah udang dan bandeng, baik dari hasil tambak atau tangkapan laut dan telah memberikan kontribusi terbesar dalam ekspor non-migas di Jawa Timur. Subsektor perikanan Kabupaten Sidoarjo ini telah menyumbang kontribusi sebesar 49,7% terhadap PDRB Sektor pertanian sepanjang tahun 2003-2008. Komoditi udang dan bandeng memiliki nilai produksi terbesar sehingga dijadikan logo icon Kabupaten Sidoarjo.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan Keputusan MKP No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan telah ditetapkan 223 Kabupaten/Kota di Indonesia sebagai Kawasan Minapolitan, termasuk Kabupaten Sidoarjo. Kawasan Minapolitan adalah kota

perikanan di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah perkotaan. Kabupaten Sidoarjo juga telah menetapkan tiga kecamatan yang akan dijadikan perintis, yaitu Jabon, Candi dan Sedati. Kawasan Minapolitan ini diharapkan mampu meningkatkan produksi ikan, pendapatan masyarakat dan pusat pertumbuhan ekonomi daerah. Kawasan Minapolitan ini akan mengakomodir ketersediaan hasil panen ikan dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil tambak, peningkatan dan pengolahan produk ikan sehingga bernilai tambah dengan mengembangkan sentra pengolahan, serta peningkatan jejaring pemasaran hasil panen maupun hasil olahan.

Bencana Lumpur Lapindo yang telah melanda Kabupaten Sidoarjo menyebabkan penurunan penghasilan petani tambak di wilayah sekitarnya termasuk pertambakkan di Kecamatan Candi. Hasil pertambakkan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Permasalahan yang terjadi adalah musim panen menjadi lebih lama, kuantitas dan ukuran bandeng yang dipanen lebih kecil, tingkat kematian ikan tinggi, harga jual bandeng menjadi lebih murah. Di sisi lain, kondisi yang dihadapi para petani tambak ini juga tidak memperoleh dukungan pendanaan

seperti industri perbankan dikarenakan usaha pertambakkan dinilai sebagai usaha yang memiliki risiko tinggi dan penuh ketidakpastian lingkungan. Pemetaan yang telah dilakukan oleh BAPEDA Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan PUM Netherland pada tahun 2015 menyatakan sebagian besar petani tambak menggunakan metode pembudidayaan tradisional, kualitas air tidak mendukung perbaikan ekosistem pertambakkan, dan kemampuan sumber daya manusia yang masih rendah. Kondisi menyebabkan hasil panen pertambakkan semakin menurun, nilai jual produk hasil tambak semakin murah sehingga perekonomian masyarakat semakin menurun.

Kondisi lain yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah belum terbangunnya jiwa kewirausahaan dikalangan masyarakat. Sebagian besar ibu-ibu petambak di Kecamatan Candi selama ini sangat tergantung pada hasil tambak atau penghasilan suami. Saat ini mereka tergabung dalam kelompok Bandeng Badjuri yaitu suatu kelompok pengolah ikan. Dampak kondisi mereka sudah mampu membuat olahan ikan namun masih bersifat musiman yang biasanya dilakukan menjelang hari raya dan belum banyak ibu-

ibu yang terlibat. Guna mewujudkan Kawasan Minapolitan ini, maka harus diciptakan kemampuan wirausaha dimana ibu-ibu petani tambak diarahkan pada peningkatan nilai hasil pengelolaan ikan dan pengelolaan usaha yang berkesinambungan.

Perkembangan usaha ibu-ibu yang tergolong sebagai usaha kecil atau UMKM yang demikian pesat memperlihatkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik yang tentunya akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Sementara itu, di sisi yang lain usaha mereka masih dihadapkan pada masalah yang terletak pada proses administrasi. Masalah utama dalam pengembangan usaha yaitu mengenai pengelolaan keuangan dalam usahanya tersebut, karena pengelolaan yang baik memerlukan keterampilan akuntansi yang baik pula oleh pelaku bisnis. Pemerintah sudah mencoba membantu mengatasi kendala yang dihadapi oleh sebagian besar UMKM, seperti melakukan pembinaan dan pemberian kredit lunak. Selain itu, apabila mereka berkeinginan memperoleh tambahan modal juga dituntut menyertakan laporan keuangan sebagai syarat mengajukan pinjaman kepada pihak bank. Pihak perbankan sendiri tidak ingin mengambil

resiko dalam penyaluran kredit bagi usaha mereka dikarenakan perbankan tidak mengetahui perkembangan usaha tersebut. Sementara hampir semua usaha tidak memiliki laporan kinerja usaha dan keuangan yang baik sebagai syarat untuk memperoleh kredit. Hal ini terjadi karena mereka tidak dibiasakan untuk melakukan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan sebagai gambaran kegiatan usaha dan posisi keuangan perusahaan. Padahal dengan adanya laporan keuangan akan memungkinkan pemilik memperoleh data dan informasi yang tersusun secara sistematis. Laporan keuangan berguna bagi pemilik untuk dapat memperhitungkan keuntungan yang diperoleh, mengetahui berapa tambahan modal yang dicapai dan juga dapat mengetahui bagaimana keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki sehingga setiap keputusan yang diambil oleh pemilik dalam mengembangkan usahanya akan didasarkan pada kondisi konkret keuangan yang dilaporkan secara lengkap bukan hanya didasarkan pada asumsi semata.

Kebanyakan dari usaha hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, dan jumlah piutang/utang. Namun, pencatatan

itu hanya sebatas pengingat saja dan tidak dengan format yang diinginkan oleh pihak perbankan. Meskipun tidak dapat dipungkiri mereka dapat mengetahui jumlah modal akhir mereka setiap tahun yang hampir sama jumlahnya jika kita mencatat dengan sistem akuntansi (H. Jati et al, 2004).

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membantu ibu-ibu petani tambak meningkatkan pendapatan melalui pengolahan hasil tambak ikan. Adapun kegiatan pendampingan usaha yang telah dilakukan adalah pelatihan kewirausahaan, pendampingan manajemen usaha, pendampingan penyusunan laporan keuangan usaha. Adanya kegiatan pengabdian masyarakat tersebut mampu membantu mewujudkan ibu-ibu wirausaha dan usaha ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan rumah tangga dan perekonomian wilayah sekitarnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PENYELESAIAN MASALAH

2.1 Pengelompokkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Badan Pusat Statistik tahun 2009 menyebutkan bahwa jumlah UKM tercatat 42,3 juta atau 99,90 persen dari total jumlah unit usaha. UKM menyerap tenaga kerja

sebanyak 79 juta atau 99,40 persen dari total angkatan kerja. Kontribusi UKM dalam pembentukan *Product Domestic Bruto* (PDB) sebesar 56,70 persen, kemudian sumbangan terhadap penerimaan devisa negara melalui kegiatan ekspor sebesar Rp 75,80 triliun atau 19,90 persen dari total nilai ekspor. Dari data tersebut menunjukkan bahwa jumlah pengusaha UKM di Indonesia sangat signifikan, terutama besar pengaruhnya terhadap keterserapan tenaga kerja serta peningkatan sumber penerimaan Negara.

UMKM sebagaimana tertuang dalam No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM mendefinisikan adalah sebagai berikut: a) **Usaha Mikro** adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini, b) **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, c)

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tak langsung dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, terutama ketika terjadi krisis ekonomi secara global yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan sehingga tidak sedikit tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Namun, krisis tersebut sedikit berdampak pada kinerja UKM bahkan mereka semakin terus berkembang. Salah satunya disebabkan UKM tidak terpengaruh oleh adanya inflasi atau penurunan nilai tukar mata uang asing (Putri Wulanditya, 2011). Penelitian yang dilakukan Hadiyah Fitriyah (2006) menyatakan pendidikan manajer, skala usaha, masa memimpin dan umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap penggunaan informasi akuntansi pada usaha

kecil. Supriyati dan Putri Wulanditya (2012) menyatakan bahwa pemahaman SAK-ETAP masih rendah dan sebagian besar dipengaruhi oleh pendidikan, jenis usaha, jumlah SDM. Regulasi pemberlakuan SAK-ETAP masih belum mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha karena sebagian besar berpendidikan menengah, jumlah tenaga akuntansi tidak banyak, pelatihan SAK-ETAP belum banyak dilakukan. Konsekuensinya masih banyak Usaha Kecil Menengah dan Koperasi belum mampu menyusun laporan keuangan.

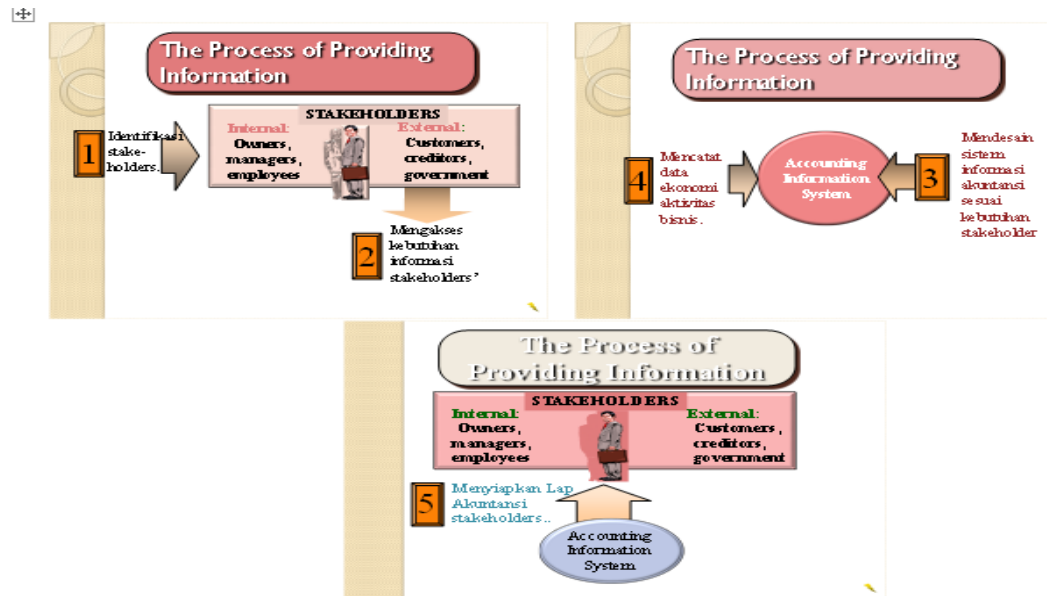
2.2 Pemahaman SAK-ETAP

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau yang disingkat SAK ETAP adalah standar akuntansi yang dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas tanpa akuntabilitas public, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan atau tidak menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal seperti pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit. Perusahaan kecil seperti UMKM tidak perlu membuat laporan keuangan dengan menggunakan PSAK umum yang berlaku yang lebih kompleks.

SAK ETAP ini telah berlaku efektif per 1 Januari 2011 dan entitas yang laporan keuangannya mematuhi SAK ETAP harus membuat suatu pernyataan eksplisit dan secara penuh (*explicit and unreserved statement*) atas kepatuhan tersebut dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP. Apabila perusahaan memakai SAK ETAP, maka auditor yang akan melakukan audit di perusahaan tersebut juga akan mengacu kepada SAK ETAP.

Di dalam merencanakan mengkoordinir dan mengendalikan usaha atau bisnis dibutuhkan informasi, untuk itu, diantaranya dibutuhkan peran akuntansi. Menurut Horngern et.al (2007, 4), akuntansi (*accounting*) adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan (*business stakeholders*). *Stakeholders* adalah perorangan atau entitas yang mempunyai kepentingan dalam menentukan kinerja perusahaan dan bagaimana prosesnya dalam menghasilkan informasi. Menurut Warren et.al (2015) Akuntansi merupakan “bahasa bisnis” semakin baik memahami bahasa

tersebut semakin baik dalam mengelola bisnis, dan Produk utama dari akuntansi adalah laporan keuangan.



Sumber : Warren et.al (2015)

Gambar 1. Siklus Akuntansi dalam Bisnis

Berdasarkan proses penyajian informasi akuntansi tersebut, maka akuntansi mencakup tiga kegiatan, yaitu: 1) Input: identifikasi transaksi, 2) Proses: mengolah transaksi, melakukan pencatatan, 3) Output: informasi akuntansi, diantaranya adalah laporan keuangan.

2.3 Karakteristik Kualitatif Informasi

Karakteristik kualitatif informasi keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat digunakan sebagai alat pengambilan

keputusan bagi pemilik dan pihak yang berkepentingan lainnya adalah **pertama dapat dipahami** dimana kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai

dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

Kedua adalah relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. **Ketiga adalah materialitas.** Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas. **Keempat adalah keandalan.**

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu. **Kelima adalah substansi mengungguli bentuk** artinya Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. **Keenam adalah Pertimbangan Sehat** dimana ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau

beban tidak disajikan lebih rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan yang lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat tidak mengijinkan bias. Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan. **Ketujuh adalah kelengkapan,** agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi. **Kedelapan adalah dapat dibandingkan.** Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan

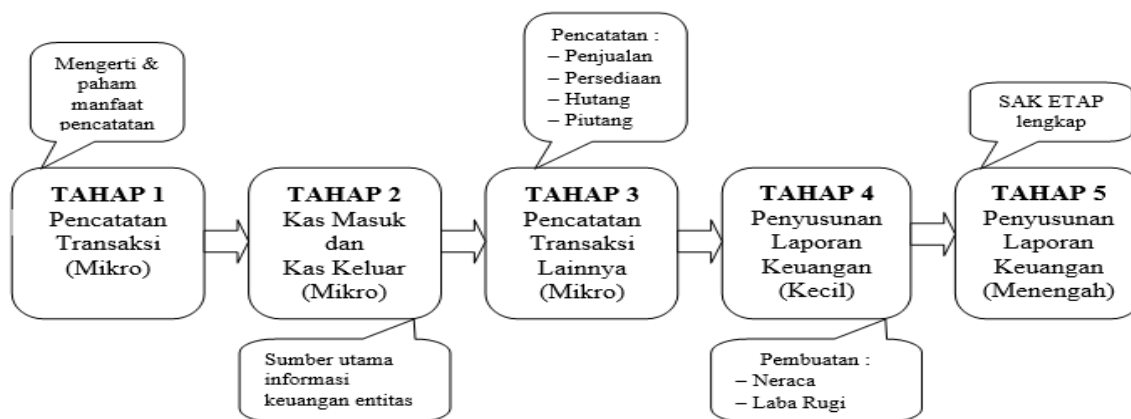
secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut. **Kesembilan adalah Tepat Waktu.** Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keputusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. **Kesepuluh adalah Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat.** Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya

tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.4 Implementasi SAK ETAP pada UMKM

Praktek akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada UKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Wahdini, 2006). Kelemahan itu, antara lain

disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari manajer pemilik dan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UKM. Penelitian yang dilakukan oleh Direktorat Kredit, BPR, dan UMKM tahun 2009 membagi tahapan implementasi laporan keuangan bagi UMKM menjadi lima tahap. Tahapan implementasinya diawali dari sosialisasi pentingnya pencatatan sampai kemampuan menyusun laporan keuangan. Berikut gambaran tahap-tahap implementasi SAK ETAP pada UMKM.



Sumber: Supriyati & Putri (2012)

Gambar 2. Tahapan Implementasi Laporan Keuangan

Pengimplementasian informasi akuntansi pada UMKM masih mengalami hambatan yang dihadapi antara lain: 1) Software yang digunakan tidak sesuai dengan situasi yang

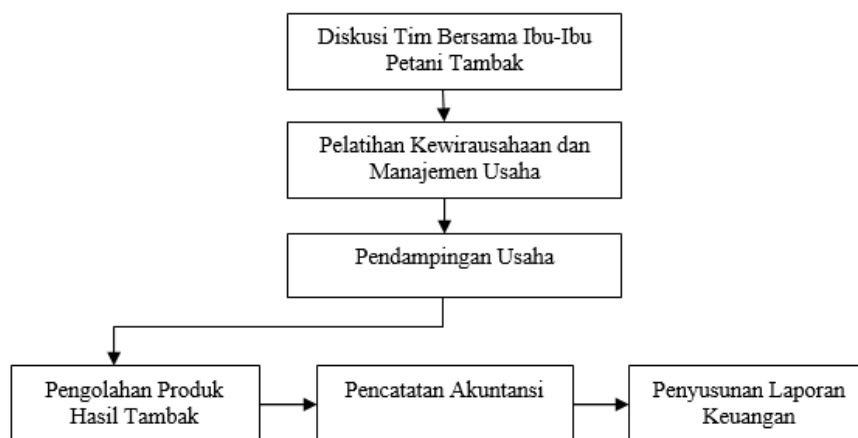
sebenarnya dihadapi oleh UKM. Mereka mengalami kesulitan untuk menemukan software yang dibutuhkan, karena para pengembang teknologi informasi tidak

membuat software khusus untuk UMKM, 2) para pelaku usaha kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan informasi akuntansi usahanya karena mereka lebih memfokuskan diri bagaimana usahanya dapat terus berjalan, 3) para pelaku usaha tidak dapat mengevaluasi informasi akuntansi secara benar dan obyektif, 4) UMKM masih kekurangan sumber daya

manusia yang memiliki pengetahuan yang memadai akan informasi akuntansi.

2.5 Kerangka Penyelesaian Masalah

Berdasarkan pemaparan kondisi yang sedang dihadapi UMKM yang ada di Kecamatan Candi Sidoarjo, maka kerangka penyelesaian masalah sebagai berikut:



Gambar 3. Kerangka Penyelesaian Masalah

III.

IV. METODE PENGABDIAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Masyarakat petambak yang berada di Kecamatan Candi memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi, namun demikian mereka memiliki adat dan budaya yang susah untuk dikembangkan. Usaha di bidang pengolahan hasil tambak yang selama ini diolah sebagian besar masih bersifat musiman. Kegiatan pengabdian kepada

masyarakat ini diarahkan untuk mampu mengubah pola pikir dan kreatifitas ibu-ibu petani tambak agar mereka menjadi wirausaha yang bisa memberikan kontribusi besar kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya.

Sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat adalah ibu-ibu petani tambak yang memiliki usaha di bidang pengolahan

hasil tambak yang berada di Kecamatan Candi Sidoarjo. Hasil pengamatan dan pemetaan usaha yang dilakukan teridentifikasi 10 orang yang sudah memiliki usaha yang berkesinambungan, yang terdiri dari 2 orang di bidang pengolahan bandeng cabut duri, 2 orang dibidang pembuatan otak-otak dan presto, 3 orang dibidang pembuatan krupuk ikan dan 3 orang adalah pemasar hasil olahan tersebut. Semua orang tergabung dalam kelompok Bandeng Badjuri, walaupun mereka sudah memiliki usaha mandiri.

Metode pengabdian yang dilakukan meliputi 1) pelatihan, 2) dan pendampingan. Pelatihan diarahkan pada peningkatan pengetahuan dan wawasan yang terkait dengan kewirausahaan, pengelolaan usaha dan diversifikasi produk olahan. Pendampingan diarahkan pada peningkatan ketrampilan dan pengembangan usaha agar operasional usaha dapat berkesinambungan. Pendampingan ini terkait dengan pembuatan SOP Usaha, evaluasi penetapan harga, pencatatan hasil usaha sampai penyusunan laporan keuangan usaha.

V. HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Candi merupakan salah satu kawasan yang telah ditetapkan sebagai

kawasan minapolitan di Kabupaten Sidoarjo, yaitu suatu kawasan pertambakkan di tengah-tengah perkotaan. Potensi terbesar di kawasan ini adalah adanya pertambakkan yang sangat luas. Namun, sejak adanya bencana lumpur lapindo di Kabupaten Sidoarjo berdampak menurunnya perekonomian masyarakat termasuk yang dialami Kecamatan Candi.

Rendahnya kuantitas dan kualitas hasil tambak mendorong tim pelaksana melakukan upaya pemberdayaan masyarakat sekitar khususnya ibu-ibu petani tambak yang ada di Kecamatan Candi. Ibu-ibu petani tambak yang awalnya adalah ibu-ibu rumah tangga sekarang sudah memiliki usaha yang berkesinambungan di bidang pengolahan ikan atau hasil tambak, walaupun target wilayah pemasarannya belum menjangkau di luar Kabupaten Sidoarjo. Produk olahan yang telah dihasilkan antara lain aneke krupuk, bandeng cabut duri, otak-otak bandeng, presto bandeng, nugget ikan, bakso ikan, abon tulang bandeng.

Adanya usaha pengolahan hasil tambak yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu petani tambak yang tergabung dalam kelompok Bandeng Badjuri perlu dilakukan pengembangan agar usaha ini lebih berkembang dan berkesinambungan. Kegiatan pelatihan yang

dilakukan dengan narasumber dari pengusaha olahan ikan yang sudah memiliki omzet tinggi yaitu Bapak As'ad dan Ibu Lita dari KOPIS (Kelompok Pengolah Ikan Sidoarjo) yang dibentuk oleh BAPEDA Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, juga diperkenalkan Ibu Yuni yang merupakan anggota pengurus Asosiasi Perhotelan dan Restoran Indonesia perwakilan Jawa Timur. Hasil dari kegiatan pelatihan ini berupa a) peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang aneka produk olahan ikan, b) peningkatan pengetahuan dan wawasan tentang manfaat legalitas, penetapan harga, standar kualitas sarana dan prasarana pengolahan, standar higienitas, 3) membangun jejaring dengan pihak lain.

Kegiatan lain yang dilakukan adalah pendampingan yang meliputi pendampingan manajemen usaha dan akuntansinya. Dari sisi manajemen usaha menunjukkan usaha yang mereka kelola selama ini hanya mempertimbangkan faktor kebiasaan dan tidak memiliki target yang pasti. Mereka tidak memiliki kemampuan mempertimbangkan alternatif bahan baku bila terjadi kesulitan memperoleh atau kenaikan harga beli sehingga saat produk akan dijual tidak mampu bersaing. Hal ini harga yang mereka tawarkan tampak mahal

dan tidak dapat ditawarkan dalam jumlah yang sangat besar. Dari sisi akuntansinya menunjukkan selama ini mereka tidak memisahkan modal usaha dan modal pribadi, mereka tidak memiliki pencatatan sama sekali sehingga tidak mampu menunjukkan kinerja usaha yang sebenarnya. Dampak semua ini tentunya mereka kesulitan bila ingin memperluas usaha karena permodalan mereka yang terbatas dan kesulitan memperoleh sumber permodalan dari perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Hasil pengamatan yang dilakukan menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi mereka adalah 1) rendahnya tingkat pendidikan mereka, 2) rendahnya kreatifitas dan pengetahuan mereka, 3) kurangnya dukungan pihak lain terkait usaha karena usaha mereka belum menjadi sebuah sentra usaha, 4) kurangnya motivasi di dalam diri mereka. Pendidikan mereka memang cukup tinggi dimana rata-rata mereka berpendidikan SMU/SMK dibidang agama dan tidak ada hubungannya dengan usaha pertambakkan maupun bisnis usaha. Pengetahuan mereka dibidang bisnis usaha masih rendah karena selama ini mereka tidak pernah diundang atau mengikuti pelatihan atau seminar atau workshop terkait dengan bisnis usaha. Dukungan pihak lain misalkan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo terkait pengembangan produk olahan juga masih rendah sehingga usaha yang ada di Kecamatan Candi mayoritas masih bersifat musiman dan belum menjadi usaha yang berorientasi profit. Selain itu, dalam diri mereka juga memiliki motivasi yang rendah dalam usaha. Hal ini karena mereka tidak memahami manfaat usaha dan pembukuannya sehingga mereka tidak membiasakan mencatat setiap transaksi yang dilakukan.

Ibu-ibu petani tambak diajari menyusun Standart Operational Procedure (SOP) dan proses pencatatan usahanya. SOP ini diperlukan agar mereka memiliki konsistensi dalam usaha sekaligus dapat dijadikan persyaratan pengajuan legalitas nantinya. Hal ini banyak usaha yang dirintis belum memiliki ijin usaha seperti NPWP, SIUP/TDP, ijin Halal, ijin dari Dipkes dan sebagainya. Selain itu, bila usaha ini akan dijadikan usaha yang berkesinambungan dan berorientasi profit, mereka harus memenuhi persyaratan legalitas sebagaimana yang tertuang dalam SOP. Pada tahap pertama merupakan langkah awal pengenalan manfaat perlunya pencatatan transaksi. Langkah yang diperlukan pada tahap ini yaitu penyelenggaraan sosialisasi secara

pasif dalam bahasa yang sederhana tentang perlunya setiap unit usaha untuk melakukan pencatatan transaksi, bagaimanapun sederhana unit usahanya sehingga pelaku usaha mengerti dan memahami manfaat pencatatan, kemudian menimbulkan kesadaran untuk mulai melaksanakan pembukuan. Tahap kedua adalah sasaran minimal yang seharusnya dapat dicapai oleh UMKM adalah setiap unit usaha harus memiliki pencatatan berupa kas masuk dan kas keluar, walaupun format pencatatannya masih sangat sederhana. Pada umumnya pencatatan kas bagi UMKM, sebatas untuk mengetahui selisih lebih (untung) atau selisih kurang (rugi) serta untuk mengetahui jumlah uang yang terdapat dalam kotak penyimpanan uang. Tahap ketiga diharapkan dapat dilakukan oleh entitas UMKM minimal pada skala mikro, yaitu tahap-tahap yang lebih intensif dalam melakukan pencatatan transaksi, antara lain: a) Pencatatan penjualan yang dilakukan secara harian dan berisi tentang jumlah penerimaan dan penjualan barang, jenis barang apa saja dengan harga berapa, serta kemana saja barang tersebut terjual; 2) Pencatatan persediaan barang yang masih ada hubungannya dengan pencatatan penjualan, karena berkaitan dengan jumlah barang yang masih tersedia, perlu pembelian kembali atau

tidak, serta jenis barang yang paling diminati oleh pembeli; 3) Pencatatan hutang dan piutang. Pada tahap keempat diharapkan dapat dilakukan oleh entitas UMKM untuk skala kecil agar dapat menyusun laporan keuangan dari pencatatan sebelumnya yang telah dilakukan. Tahap ini telah mencakup seluruh aspek minimal dalam membuat laporan rugi/laba maupun neraca, walaupun mungkin akan masih banyak kekurangan. Akhir tahap adalah penyusunan laporan keuangan yang auditable. Setelah pelaku usaha mampu membuat laporan keuangan sederhana, maka diharapkan mulai mengalami peningkatan terutama seluruh pencatatan telah lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi UMKM (SAK ETAP). Tahapan ini diharapkan dapat dicapai oleh UMKM dengan skala menengah. Karena secara organisasi lebih besar dengan kemampuan dari segi finansial mampu untuk memisahkan tenaga khusus yang menangani keuangan serta mulai menggunakan sistem maupun perangkat lunak akuntansi.

VI. KESIMPULAN

Kawasan Minapolitan adalah kawasan kota di daerah pertambakan. Kecamatan Candi merupakan kecamatan di Kabupaten

Sidoarjo yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Minapolitan. Adanya bencana Lumpur Lapindo yang melanda Kecamatan Porong berdampak penurunan penghasilan petani tambak di wilayah sekitarnya termasuk Kecamatan Candi. Kondisi ini juga tidak memperoleh dukungan pendanaan seperti industri perbankan dikarenakan usaha pertambakan dinilai sebagai usaha yang memiliki risiko tinggi. Hal ini tentunya memperburuk perekonomian masyarakat sekitar.

Program Kawasan Minapolitan mendorong upaya pemberdayaan ibu-ibu petani tambak dengan menggalakkan peningkatan usaha pengolahan hasil tambak. Terbentuknya kelompok Bandeng Badjuri wujud nyata kreatifitas ibu-ibu petani tambak. Usaha ini telah berjalan secara berkesinambungan, walaupun omzetnya belum tinggi. Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan ketrampilan ibu-ibu dalam pengelolaan manajemen usaha dan akuntansi agar nantinya kinerja usaha dapat terukur.

Kegiatan pengabdian yang dilakukan berupa pelatihan dan pendampingan mulai dari pelatihan kewirausahaan, penyusunan SOP, pendampingan pengelolaan usaha,

pencatatan akuntansi sampai penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan bermanfaat: 1) untuk mengetahui keuntungan atau kerugian atas usaha yang dilakukan, 2) alternatif memperoleh sumber pendanaan untuk memperbesar usaha melalui pengajuan kredit perbankan atau koperasi, 3) sarana pengajuan hibah/bantuan dari dinas terkait antara lain bantuan peralatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sidoarjo, dari Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidoarjo serta dari BAPEDA Sidoarjo, 4) memperluas jejaring dengan organisasi sejenis misalkan saat ini tergabung dalam Kelompok Pengolah Ikan Kabupaten Sidoarjo (KOPIS). Namun, permasalahan yang menjadi pertimbangan tim pelaksana maupun pihak terkait dimasa yang akan datang adalah rendahnya pengetahuan tentang proses pencatatan dan akuntansi artinya walaupun mereka sudah memiliki media pencatatan tetapi belum secara maksimal dilakukan karena keterbatasan kemampuan mereka. Karena perlu dukungan dan monitoring pihak terkait agar kebiasaan mencatat itu menjadi kebutuhan dan budaya dalam pengembangan usaha mereka.

VII. SARAN

Saran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini untuk mendukung terwujudnya kawasan minapolitan perlu adanya dukungan pihak terkait untuk mengembangkan potensi wilayah yang ada. Dukungan pihak terkait itu berupa: 1) pemberian pelatihan pengembangan usaha secara periodik, 2) dukungan sarana dan prasarana baik proses perijinan maupun peralatan yang digunakan untuk meningkatkan omzet usahanya, 3) dukungan jejaring dengan pihak pemasar serta 4) peningkatan kemampuan SDM. Bila pemerintah maupun pihak terkait mampu memberikan dukungan tentunya usaha yang dikembangkan ibu-ibu petani tambak akan semakin berkembang dan berkesinambungan sehingga di masa mendatang akan mampu mendukung peningkatan perekonomian mereka dan masyarakat sekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Hadiyati Fitriyah. 2006. Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Usaha Kecil dan Menengah. Universitas Negeri Jakarta. Tesis Magister dipublikasikan.
- [2] Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Jakarta: DSAK IAI.

- [3] Jati Hironnymus, Bala Beatus dan Otnil Nisnoni. 2004. Menumbuhkan Kebiasaan Usaha Kecil Menyusun Laporan Keuangan. Jurnal Bisnis dan Usahawan, II No. 8 : 210 – 218.
- [4] Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- [5] Republik Indonesia. 2011. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. KEP.39/MEN/2011 tentang Perubahan Keputusan MKP No. KEP.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan
- [6] Supriyati dan Putri Wulanditya. 2012. The SME Perception toward the Accounting Standard without Public Accountability (SAK-ETAP) and Self Assessment System for Increasing Voluntary Tax Compliance. International Journal of Business and Management ISSN 2244-1808 Vol.4 Oktober 2012
- [7] Putri Wulanditya. (2011). Kemudahan Penyajian Pajak Penghasilan (PPh) bagi Pengusaha UKM dengan SAK ETAP. Simposium Nasional Perpajakan (SNP) III. Madura, 13-14 Desember 2011
- [8] Warren,Fess. Et al. 2015. Akuntansi Pengantar Adaptasi Indonesia. Penerbit Salemba Empat.
- [9] Wahdini dan Suhairi. 2006. Persepsi Akuntan Terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Bagi Usaha Kecil Dan Menengah. SNA IX – Padang.